

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2022.
- Bagong, Suyanto, dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Bintoro, Rahadi Wasi, dkk. *Hukum Acara Perdata*. Purwokerto: UNSOED Press. 2022.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Yogyakarta: CV.Maha Karya Pustaka. 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Pruit, Dean G & Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ramadhani, Rahmat. *Hukum Agraria (Suatu Pengantar)*. Medan: UMSU Press. 2018.
- Ratman, Desriza. *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-win Solution*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.
- Rumadan, Ismail. *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia 2017.
- Salim Hs. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers., 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sutedi, Adrian. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Suwardi, Ismail. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku. 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 83)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 84)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369)

### **Jurnal Hukum**

Ariffin Bur. *Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah*. UIR Law Review; Vol 01 No. 02, Oktober 2017.

Rochani Urip Salami dan Rahadi Wasi Bintoro. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce)*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman; Vol. 13 No. 1, 2013.

Rosmidah. *Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Jambi: Vol. 6 No. 2, 2013

Sri Hajari, Agus Sekarmadji dan Sri Winarsi. *Model Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dalam Mewujudkan Penyelesaian Yang Efisiensi dan Berkepastian Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga; Vol. 14 No. 1, Januari 2014.

### **Data Primer**

Hasil Wawancara dengan R. Sriwinarno selaku pegawai bagian Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada 20 Desember 2022.

Hasil Wawancara dengan Soheri selaku Kepala Desa Wiradadi di Balai Desa Wiradadi Sokaraja pada tanggal 29 Maret 2023.

Hasil Wawancara dengan Narsidah, S.H selaku Advokat di Kantor Hukum dan Konsultasi Hukum Aan Rohaeni, S.H dan Rekan pada tanggal 31 Maret 2023.

